

KAPASITAS BPBD KABUPATEN BLORA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Oleh :

Ega Elyana, Drs. Aufarul Marom, M.Si

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos.

1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Blora is one of the areas in Central Java which is prone to disaster area. Potential disasters that may occur in Blora are drought, floods, landslides, whirlwinds and fires. This study aims to describe how the capacity of The Regional Disaster Relief Agency (BPBD) of Blora in regional disaster management area and know the constraints that exist in BPBD Blora in disaster management. This research use qualitative method, data source used is primary data and secondary data. The data will be analyzed by descriptive analysis method. The theoretical basis used is the theory of capacity assessment by Patton & Sawicky. Based on the analysis, it was found that The Regional Disaster Relief Agency (BPBD) of Blora deficient in terms of supporting infrastructure for disaster relief and infrastructure that is already available is need for rejuvenation, there is no human resources qualified in the field of disaster, there is no early warning system or often called the early warning system (EWS), which serves to provide warning of the hazard.

Keywords: Capacity, Institution, Human Resources, Infrastructure, Early Warning System

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara rawan bencana, melihat kenyataan saat ini berbagai bencana yang dilatarbelakangi oleh kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis maka dari itu diperlukan badan/instansi yang secara khusus menangani bencana yang dialami di Negara.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Berdasarkan amanah UU Nomor 24 Tahun 2007 maka dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan instansi pemerintah yang menjalankan tugas dibidang penanggulangan bencana di daerah dituntut juga untuk meningkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana. Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional mengeluarkan Peraturan Tentang Pedoman Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 berarti bahwa setiap BPBD harus meningkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana, serta setiap BPBD dituntut untuk mengembangkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana.

Dilatarbelakangi oleh kondisi wilayah Kabupaten Blora yang memiliki potensi bencana yang melanda Kabupaten Blora setiap tahunnya sehingga membutuhkan penanganan secara serius, serta berdasarkan amanat dari UU Nomor 24 Tahun 2007 maka pemerintah Kabupaten Blora membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora dan Peraturan

Daerah Kabupaten Blora Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Blora untuk meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana.

Penilaian kapasitas digunakan sebagai dasar untuk menilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Melalui penilaian kapasitas yang dilakukan maka akan diketahui sejauh mana kapasitas dan kinerja BPBD Kabupaten Blora dalam penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Blora merupakan instansi baru yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Blora pada tahun 2014, maka sangat perlu adanya penilaian kapasitas untuk bahan acuan evaluasi supaya dapat memperbaiki kekurangan dan mengurangi kendala-kendala yang dialami selama ini.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana kapasitas BPBD Kabupaten Blora dalam penanggulangan bencana daerah dan menelaah apakah BPBD Kabupaten Blora sudah memiliki kapasitas yang baik sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh BNPB dengan berbagai indikator yang harus dipenuhi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kapasitas BPBD Kabupaten Blora dalam penanggulangan bencana ?
2. Kendala apa yang dialami oleh BPBD Kabupaten Blora dalam menjalankan tugas serta perannya ?

C. Tujuan

1. Mengkaji kapasitas BPBD Kabupaten Blora dalam tanggap darurat penanggulangan bencana di Kabupaten Blora
2. Mengkaji penanganan bencana oleh BPBD Kabupaten Blora
3. Mengetahui kendala BPBD Kabupaten Blora dalam menangani dan mengatasi bencana di Kabupaten Blora

D. LANDASAN TEORI

1. Administrasi Publik

Nicholas Henry (Pasolong;2010:8) mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Dari definisi administrasi publik di atas, dapat dipahami bahwa kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Selain itu, BPBD Kabupaten Blora sendiri tidak terlepas dari administrasi publik karena membahas sistem manajemen dan organisasi atau kelembagaan yang berkaitan erat dengan kebijakan publik.

2. Manajemen Publik

Mary Parker Follet (T. Hani Handoko:2011:8) mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui

orang lain. James A. F. Stoner (T. Hani Handoko:2011:8) mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari beberapa definisi manajemen di atas, dapat dipahami bahwa manajemen dapat diartikan sebagai seni, proses bahkan ilmu untuk mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan dan menggunakan sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi. BPBD Kabupaten Blora menggunakan manajemen baik itu dari kegiatan-kegiatannya maupun sumber daya untuk mencapai tujuan.

3. Paradigma Manajemen Publik

Ada tiga paradigma yaitu Administrasi Publik Tradisional / Klasik (The Old Public Administration), Manajemen Publik Baru (New Public Management), dan Pelayanan Publik Baru (New Public Service), Meskipun secara

garis besar hanya ada 3 paradigma besar dalam pelayanan publik, namun ada beberapa akademisi yang menyatakan bahwa governance merupakan salah satu paradigma dalam pelayanan publik.

Peningkatan kapasitas merupakan tugas pemerintah, dengan berkembangnya paradigma pelayanan publik saat ini maka semua pelayanan yang diberikan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.

BPBD Kabupaten Blora harus meningkatkan atau memiliki kapasitas yang baik dalam kebencanaan, hal tersebut juga merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Good Governance.

4. Kapasitas

Kapasitas yaitu kombinasi keseluruhan kekuatan, kelengkapan dan sumber daya yang dimiliki sebuah masyarakat, kelompok sosial, atau organisasi yang dapat digunakan untuk meraih tujuan yang disepakati, termasuk yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim (UNDP, 2009).

Menurut Fukuda-Parr bahwa

“Capacity is the ability to perform functions, solve problems and set and achieve objectives” (Fukuda-Parr & al., dalam Willems and Baumert, 2003:5).

Mengacu kepada pernyataan Fukuda, kapasitas tidak hanya berkisar pada apa yang dimiliki organisasi untuk mengorganisasikan atau menggerakkan elemen-elemen dalam organisasi terkait dengan pencapaian tujuannya.

5. Kapasitas Institusi

Secara general kapasitas institusi dapat dikatakan sebagai kondisi internal organisasi yang menunjukkan kemampuan untuk menyediakan dan menggerakkan sumber daya terkait dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, kapasitas institusi adalah kemampuan organisasi untuk merancang tujuan-tujuan dan mencapainya dalam konteks ketersediaan sumber daya internal organisasi sekaligus kemampuannya untuk menambah atau memperbaiki ketersediaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan

memanfaatkan sumber daya eksternal.

6. Kapasitas Kebencanaan

Kapasitas di dalam kebencanaan ini adalah kombinasi keseluruhan kekuatan, kelengkapan dan sumber daya yang dimiliki sebuah masyarakat, kelompok sosial, atau organisasi yang dapat digunakan untuk meraih tujuan yang disepakati, termasuk yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim (UNISDR dalam UNDP, 2009)

Kabupaten Blora sendiri tidak terlepas dari kombinasi keseluruhan kekuatan, kelengkapan sumber daya yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan.

7. Risiko Bencana

Rumus risiko bencana yang dikemukakan Wisner (2004) :

$$\text{Risk (R)} = H \times V / C$$

Keterangan => R : Resiko Bencana

H : Bahaya

V : Kerentanan

C : Kapasitas

Dapat disimpulkan bahwa pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan memperkecil kerentanan dan memperbesar kapasitas. Untuk mengurangi risiko bencana yang ada di Kabupaten Blora maka BPBD Kabupaten Blora dapat melakukan peningkatan kapasitasnya untuk memperkecil kerentanan risiko bencana.

8. Penilaian Kapasitas

Secara umum kajian pengukuran kapasitas pemerintah daerah dalam mengurangi resiko bencana menurut Patton & Sawicky (1986), Soeprapto (2005), UNDP (2009) dan World Bank (2010) terdiri dari beberapa indikator yaitu Regulasi, Komitmen Organisasi, Aparatur, Pembiayaan dan Daya Dukung Organisasi. Kelima indikator tersebut berhubungan dengan indikator yang digunakan oleh BNPB untuk menilai kapasitas BPBD dalam menanggulangi bencana.

Tabel 1.2

Indikator Pengukuran Kapasitas

No	Patton & Sawicki (1986)	Soeprapto (2005)	UNDP (2009)	World Bank (2010)	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
1	<i>Authority</i>	Tingkatan system	<i>Enabling Environment</i>	<i>Governance and Sustainability</i>	Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan
2	<i>Institutional Commitment</i>	Tingkatan institusional	<i>Organizational</i>	<i>Human Resource Capacity Building</i>	Kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana

					Sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama Rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana
3	<i>Capability</i>	Tingkatan individual	<i>Individual</i>	<i>Enterprise Innovation</i>	Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan Tersedianya cadangan finansial dan logistik
4	<i>Organizational Support</i>			<i>R&D to Adapt Technology</i>	Tersedianya cadangan finansial dan logistik

				<i>for Local Solutions</i>	
				<i>Acquire Existing Knowledge</i>	
				<i>Technology Transfer</i>	Sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat

Analisa mengenai indikator, serta tolak ukur yang akan digunakan dalam melakukan kajian tingkat kapasitas BPBD Kabupaten Blora dalam penanggulangan bencana ini dilakukan dengan melakukan kajian dengan menggunakan pengukuran kapasitas yang bersumber dari Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012. Dengan prioritas program diantaranya adalah:

1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya
2. Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah
3. Terwujudnya penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kapasitas dan budaya aman dari bencana di semua tingkat
4. Mengurangi faktor-faktor risiko dasar

5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat

Analisa selanjutnya adalah menilai tingkat kapasitas yang dimiliki oleh BPBD didalam pengurangan risiko bencana. Penilaian kapasitas ini dilakukan dengan membandingkan kondisi ideal yang diharapkan dengan apa yang ditemui di lapangan. Kapasitas dinilai lemah apabila tidak dimiliki oleh subjek penelitian. Kapasitas dinilai cukup apabila sudah dimiliki namun masih belum di implementasikan. Kapasitas dinilai baik apabila sudah sesuai dengan tolak ukur dan sudah diimplementasikan oleh subjek penelitian.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu penelitian yang bersifat deskriptif, jadi penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Alasan peneliti memilih menggunakan kualitatif adalah peneliti ingin membandingkan apa yang terjadi di lapangan dengan teori yang digunakan sebagai sesuatu yang diharapkan dengan

mendeskripsikannya dengan kata-kata/kalimat.

Situs, lokasi atau wilayah yang diambil dalam penelitian ini adalah BPBD Kabupaten Blora. Informan dalam penelitian kualitatif ini adalah pegawai dan staf BPBD Kabupaten Blora. Teknik yang digunakan dalam memilih informan adalah dengan menggunakan teknik snowball.

Di dalam penelitian ini jenis-jenis data yang digunakan adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Tahap analisis data yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan cara mengumpulkan data lalu mereduksi data.

PEMBAHASAN

Penilaian kapasitas ini dilakukan dengan membandingkan kondisi ideal yang diharapkan dengan apa yang ditemui di lapangan. Penilaian kapasitas ini dilakukan

dengan menggunakan pedoman penilaian kapasitas yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 dengan indikator :

1. Pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya

a. Kerangka Hukum

Untuk kondisi saat ini BPBD Kabupaten Blora memiliki regulasi-regulasi, regulasi itu diantaranya adalah peraturan hukum yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 tentang Organisasi Pembentukan BPBD, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Blora.

b. Sumberdaya

Sumberdaya yang dialokasikan di BPBD Kabupaten Blora memang masih kurang terutama untuk peralatan pendukung penanggulangan bencana serta perlu

adanya peremajaan, dan kekurangan sumberdaya manusia hal itu pun menjadi kendala yang dialami oleh BPBD Kabupaten Blora.

c. Partisipasi dan desentralisasi komunitas

Telah terjalin partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal oleh BPBD Kabupaten Blora dengan pihak-pihak terkait, partisipasi tersebut melibatkan relawan kebencanaan yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Blora, partisipasi dari masyarakat, pelajar, mahasiswa, relawan SAR, instansi terkait, para pejabat pemerintahan, serta dunia usaha.

d. Forum / Jaringan Daerah Khusus

Belum ada forum/jaringan daerah khusus yang dibentuk secara resmi di Kabupaten Blora namun fungsinya hampir sama dengan relawan

2. Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah

a. Data Bahaya dan Kerentanan

BPBD Kabupaten Blora mempunyai kajian risiko bencana berdasarkan data bahaya dan kerentanan, data tersebut berupa peta rawan bencana di Kabupaten Blora.

b. Sistem-sistem yang siap

Sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip, dan menyebarluaskan data potensi bencana adalah dengan pendirian posko bencana di masing-masing Kecamatan serta penyebarluasan informasi melalui siaran radio, banner, Koran, dll.

c. Sistem peringatan dini yang siap beroperasi

Belum ada sistem peringatan dini bencana yang beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Blora, padahal EWS sangat dibutuhkan oleh BPBD Kabupaten Blora terutama untuk daerah yang rawan terdampak banjir serta tanah longsor, jika terjadi bencana biasanya warga hanya menggunakan kentongan tradisional sebagai bentuk pemberitahuan terjadinya bencana kepada warga

d. Risiko-risiko lintas batas

Belum ada kerjasama antar daerah untuk pengurangan risiko bencana. Namun mengacu pada instruksi-instruksi BNPB bahwa jika disuatu daerah terjadi keadaan krisis darurat maka daerah sekitar/penyangga wajib mengerahkan sumber dayanya.

3. Penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kapasitas dan budaya aman dari bencana

a. Informasi yang relevan mengenai bencana

Saat ini sudah ada jejaring informasi yang relevan mengenai bencana yang dapat diakses semua tingkat/ lapisan masyarakat yaitu melalui Facebook, Twitter, WhatsApp, maupun laporan tertulis.

b. Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan

BPBD Kabupaten Blora telah bekerjasama dengan lembaga pendidikan untuk menanamkan konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan pasca bencana dengan cara memberikan sosialisasi tentang bencana, pelatihan

bencana serta kegiatan simulasi bencana.

c. Metode riset serta analisis manfaat-biaya

Metode riset untuk kajian risiko multi bencana yang digunakan adalah dengan cara pemantauan secara langsung dan tidak langsung ke daerah potensi bencana. Belum ada analisis manfaat-biaya (cost benefit analysis).

d. Strategi membangun kesadaran seluruh komunitas

Strategi BPBD Kabupaten Blora untuk membangun kesadaran masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan adalah dengan cara selalu memberikan penyuluhan, pelatihan, simulasi kebencanaan di semua lapisan masyarakat.

4. Faktor-faktor risiko dasar

a. Pengurangan risiko bencana

BPBD Kabupaten Blora selalu bersinergi dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan usaha-usaha pengurangan risiko bencana seperti melaksanakan penghijauan yang bekerjasama dengan BLH dan Perhutani, bersih-bersih sungai

bekerjasama dengan BLH dan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai).

b. Pembangunan sosial

Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial yang dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bahaya adalah dengan pembangunan sosial yang berupa diwujudkannya Desa Tanggul Bencana Banjir, didirikannya posko siaga bencana dan posko kesehatan yang berada di wilayah Menden di Desa, serta selalu mengedepankan/memprioritaskan kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, anak-anak, dan orang sakit serta disabilitas (orang-orang berkebutuhan khusus).

c. Sektoral di bidang ekonomi dan produksi

Untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi dengan bekerjasama dengan SKPD terkait seperti Disperindagkop karena yang paling berwenang di sektor ekonomi adalah instansi tersebut, BPBD hanya memberikan saran/masukan.

d. Pengelolaan pemukiman manusia

Bekerjasama dengan Perumahan, Pemukiman dan

Perhubungan dalam hal IMB BPBD Kabupaten Blora dilibatkan untuk survey dan memberikan saran/masukan kepada SKPD pemberi izin.

e. Rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana

Langkah pengurangannya adalah selalu memberikan kajian terhadap proses-proses rehabilitasi baik itu sarana prasarana umum seperti jalan, jembatan maupun pemukiman untuk kesiapan selanjutnya supaya kedepannya wilayah yang terdampak bencana tidak separah yang sebelumnya bahkan tidak melanda lagi wilayah tersebut karena proses rehabilitasi sudah berpegang pada langkah pengurangan risiko bencana.

f. Menilai dampak-dampak risiko bencana

Prosedurnya yaitu dengan membentuk Tim berdasarkan SK Bupati terkait, setiap pengajuan untuk mendirikan bangunan mengajukan berkas-berkas seperti KTP, KK, Surat Permohonan, Surat hak milik tanah, RAB, IMB, Izin AMDAL dari LH, setelah itu cek ke lapangan jika cocok

dengan berkas dan tidak merusak lingkungan maka akan ditertibkan.

5. Kesiapsiagaan terhadap bencana

a. Kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana

Mekanisme penanganan darurat bencana sudah melalui proses yang baik yaitu tahap tindak awal yaitu tahap penerimaan informasi kejadian bencana, menyiapkan fasilitas komponen unsur perlengkapan peralatan dan fasilitas pendukung lainnya, pertolongan darurat, dan dokumentasi yaitu pendataan laporan analisa serta data-data kemampuan operasi penanggulangan bencana guna kepentingan misi penanggulangan bencana yang akan datang.

b. Rencana kontijensi

Terdapat rencana kontijensi bencana yang berpotensi terjadi seperti adanya Desa Tanggul Bencana di Menden yang rawan bencana banjir sebagai upaya antisipasi dari bencana banjir dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir.

c. Cadangan finansial dan logistik

Cadangan logistik selalu siap dan dapat digerakkan ke daerah darurat diantaranya sandang, pangan obat-obatan, bahan bangunan, dll.

d. Prosedur dan tinjauan pasca bencana

Prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat sudah melewati prosedur yang tepat dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BNPB.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengurangan risiko bencana sudah menjadi sebuah prioritas di BPBD Kabupaten Blora dilihat dari beberapa indikator yaitu BPBD Kabupaten Blora telah memiliki pedoman peraturan yang jelas. Indikator sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan dinilai masih kurang kurang namun personil yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Blora juga masih kurang/terbatas dan kurang berkompeten di bidang kebencanaan.

Indikator partisipasi, telah terjalin partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal oleh BPBD Kabupaten Blora dengan pihak-pihak terkait. Indikator forum/jaringan daerah khusus belum ada forum/jaringan daerah khusus yang dibentuk secara resmi di Kabupaten Blora namun fungsinya hampir sama dengan relawan Surosentiko.

BPBD Kabupaten Blora mempunyai kajian risiko bencana berdasarkan data bahaya dan kerentanan, data tersebut berupa peta rawan bencana di Kabupaten Blora. BPBD Kabupaten Blora telah memiliki sistem-sistem yang siap siaga 24 jam untuk melaporkan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Sistem-sistem tersebut adalah posko-posko bencana di masing-masing kecamatan di Kabupaten Blora.

BPBD Kabupaten Blora belum memiliki sistem peringatan dini bencana . BPBD Kabupaten Blora sudah memiliki jejaring informasi yaitu melalui Facebook,

Twitter, WhatsApp, maupun laporan tertulis.

Indikator kurikulum sekolah, saat ini BPBD Kabupaten Blora telah menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan. BPBD Kabupaten Blora sudah menggunakan metode riset Sedangkan untuk analisis manfaat-biaya (cost benefit analysist) belum dilakukan oleh BPBD Kabupaten Blora.

Strategi yang dilakukan BPBD Kabupaten Blora untuk membangun kesadaran adalah dengan cara selalu memberikan penyuluhan, pelatihan, simulasi kebencanaan di semua lapisan masyarakat. Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan- kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, BPBD Kabupaten Blora selalu bersinergi dengan SKPD terkait

Indikator pembangunan sosial yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Blora yaitu berupa diwujudkannya Desa Tanggul Bencana Banjir, didirikannya posko siaga bencana dan posko kesehatan

serta penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana seperti rencana kontijensi, penyuluhan, pelatihan kebencanaan, dan simulasi bencana serta selalu memprioritaskan kelompok rentan.

Indikator rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi BPBD Kabupaten Blora bekerjasama dengan SKPD terkait seperti Disperindagkop. Indikator Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia, BPBD Kabupaten Blora dilibatkan untuk survey dan memberikan saran/masukan kepada SKPD pemberi izin.

Indikator langkah-langkah pengurangan risiko bencana, langkah-langkah pengurangannya sudah terpenuhi dan dilakukan dengan baik. Indikator prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana, sudah melewati prosedur yang baik seperti yang telah ditetapkan.

Indikator kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat sudah terpenuhi dengan baik.

Dilihat dari indikator bencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan regular, adanya Desa Tanggul Bencana di Menden yang rawan bencana banjir

Indikator cadangan finansial dan logistic, cadangan logistik selalu siap dan dapat digerakkan ke daerah darurat diantaranya sandang, pangan obat-obatan, bahan bangunan, dll.

Dilihat dari indikator prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana sudah melewati prosedur yang tepat dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BNPB

B. Saran

Kerangka hukum masih perlu adanya penambahan peraturan karena peraturan yang sudah ada belum mencakup semua kegiatan teknis. Sumberdaya sarana prasarana yang sudah ada sebaiknya dikelola sebaik-baiknya.

Jika perlu peremajaan hendaknya mengalokasikan dana khusus/penganggaran khusus untuk melakukan peremajaan sarana

prasarana. Untuk melengkapi sumberdaya manusia yang berkualifikasi dibidang kebencanaan sebaiknya rekrutmen pegawai di BPBD Kabupaten Blora di berlakukan syarat-syarat tertentu yaitu diharuskan yang memiliki latar belakang pendidikan, pengetahuan, pengalaman, atau keahlian di bidang kebencanaan sehingga BPBD Kabupaten Blora dapat merekrut tenaga kerja yang benar-benar profesional di bidang kebencanaan.

Sistem peringatan dini atau sering disebut EWS yang belum dimiliki sebaiknya BPBD Kabupaten Blora merealisasikan adanya EWS dengan melakukan pengajuan pengadaan alat kepada BPBD provinsi/BNPB secara aktif dan serius karena mengingat EWS sangat dibutuhkan terutama di wilayah-wilayah yang rawan bencana banjir dan tanah longsor. Untuk analisis manfaat-biaya sebaiknya BPBD Kabupaten Blora melakukan perhitungan cost benefit analysis supaya mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk riset kajian risiko bencana sebanding dengan manfaat yang didapatkan atau tidak, sehingga

dari perhitungan tersebut dapat diketahui apakah metode riset yang dilakukan sudah efisien/belum., jika metode riset yang dilakukan belum efisien maka dapat mengembangkan metode riset lain yang lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta Kusuma Seta. 1987. *Konservasi Sumberdaya Tanah dan Air*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. BPFE-Yogyakarta.
- Creswell , Jhon W Fawaid Ahmad.2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif*,
- Creswell, John, 1994, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, London: SAGE Publications
- GTZ- SfDM Report, *Support for Decentralization Measures (2005) Guidelines on Capacity Building in the Regions*, hal 11-15

- Handoko, T. Hani. (2010). *Manajemen Personalia & Sumber daya Manusia*.
- Hilton, Ronald W., Michael W. Maher, Frank H. Selto.(2003).*Cost Management — Strategies for Business Decisions 2nd edition*, The McGraw-Hill Companies, Inc, New York.
- Willems, S. and Baumert, K. (2003). *Institutional Capacity and Climate Actions*. France, Organization for Economic Co-operation and Development.
- Milen, Anneli. (2006) *Capacity Building Meningkatkan Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta, Pembaruan
- Millen, Anneli, *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas Pembaruan*, Yogyakarta, 2003.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Moleong, Lexy. J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Patton, Carl V. & David S. Sawicky. 1986. *Basic Methods of Policy Analysis & Plannin.*, New Jersey. Prentice Hall
- Ramli, Soehatman. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana*, Jakarta: Dian Rakyat
- Siebel, Hans Dieter, *Islamic Microfinance in Indonesia*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), August 2005.
- Soeprapto, Riyadi. 2006. *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- T, Hani Handoko. 2011. *Manajemen, Edisi Kedua*, Yogyakarta: BPFE
- T, Keban Yeremias, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*,

- Konsep, Teori dan Isu*, Gaya Media, Yogyakarta, 2004.
- USAID, (2000), *Measuring Institutional Capacity*, USAIDCenter for Development Information and Evaluation.
- Wisner, B., Blaikie, Piers., Cannon, Terry., Davis, Ian., 2004, *At Risk: Natural Hazard, People's Vulnerability and Disaster*, Routledge; London.
- Sumber Lain :
- Fandy Triawan dan Djoko Santoso
 Abi Suroso, 2013, *Studi Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi. Studi Kasus: Kota Pariaman, Sumatera Barat, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB*, hal. 163-168.
- GTZ, (2005), *Guidelines on Capacity Building in The Regions*
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2012
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- UNDP dan Pemerintah Republik Indonesia, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009. Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas dengan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana, 2006
- UNDP. 2009. *Basic of Capacity Development for Disaster Risk Reducation*. Switzerland
- UNDP. 2009. *Capacity Needs Assessment In Disaster Risk Reduction: Country, District and Community Assessment*. Liberia
- World Bank. 2010. *Science, Technology and Innovation Capacity Building Partnerships for Sustainable Development*. Washington